

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setelah konflik Rusia-Ukraina yang berkaitan dengan aneksi Kriema pada tahun 18 Maret 2014, konflik antara Rusia dan Ukraina terus memanas hingga pada 21 Februari 2022 Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui dua wilayah di Ukraina Timur yang memisahkan diri dari pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelensky yaitu Donetsk dan Luhansk dengan menandatangani dokumen pengakuan kemerdekaan di wilayah separatis tersebut.<sup>1</sup>

Pada 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengerahkan pasukan militer Rusia untuk melakukan serangan ke Ukraina. Serangan ini ditandai dengan adanya ledakan di dekat kota-kota besar di seluruh negeri. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia tidak berencana untuk menduduki Ukraina karena pasukan militer Rusia hanya akan melancarkan serangan ke pangkalan militer dan Bandar udara milik Ukraina.<sup>2</sup>

Sejak pernyataan Rusia untuk masuk ke wilayah Ukraina, berbagai pemimpin dunia pun mengancam aksi tersebut yang kemudian berujung pada rentetan sanksi ekonomi yang diterima Rusia yang mana secara khusus diterapkan dengan tujuan untuk melemahkan ekonomi Rusia dan elit politik secara fatal.

---

<sup>1</sup> Rizky Jaramaya & Lintang Satria, “Presiden Rusia Akui Donetsk dan Luhansk Sebagai Negara Bagian yang Merdeka”, <https://www.republika.co.id/berita/r7olwt370/presiden-rusia-akui-donetsk-dan-luhansk-sebagai-negara-bagian-yang-merdeka>. (20/3/2023, 18.00 WIB)

<sup>2</sup> BBC News, “Russian Forces Launch Major Military Assault in Ukraine”, <https://www.youtube.com/watch?v=nbQVPSvGnmQ>. (20/3/2023 18.30 WIB)

Sejumlah negara seperti Inggris, dan Jerman mulai menekan Rusia dengan menerapkan sanksi tahap awal. Uni Eropa pun turut andil dengan menerapkan sanksi yang sama kepada Rusia atas tindakannya menginvasi Ukraina.

Dalam upayanya untuk mencegah konflik semakin buruk melalui jalur diplomasi, Jerman telah berulang kali menyatakan bahwa langkah Rusia untuk menginvasi Ukraina akan ditanggapi dengan sanksi ekonomi dan keuangan yang serius. Pemerintah Jerman melalui Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock memberikan tanggapannya terhadap perang yang melanggar hukum internasional ini dengan menjatuhkan sanksi yang secara bertahap akan ditingkatkan beberapa kali.<sup>3</sup> Bekerja dalam kemitraan dengan Uni Eropa, Jerman turut mengadopsi sanksi terhadap individu dan organisasi di sektor keuangan, energi, dan transportasi serta pemberlakuan pembatasan visa.

Di sektor energi, larangan ekspor akan diberlakukan secara khusus untuk membuat Rusia tidak dapat memperbarui kilang minyaknya yang mana pasar terbesar minyak Rusia adalah ke Uni Eropa sehingga membuat Rusia bergantung pada perdagangan energi ini. Selain itu, larangan impor batu bara dari Rusia telah disepakati pada 8 April 2022 dan pada 3 Juni 2022 Uni Eropa juga telah memberlakukan embargo pengiriman minyak Rusia.<sup>4</sup> Sanksi ekonomi yang diberikan Jerman kepada Rusia direspon Rusia dengan pembatasan suplai gas alam dari Gazprom melalui jalur pipa Nord Stream 1 ke Eropa. Penghentian suplai gas

---

<sup>3</sup> Auswärtiges Amt, *United Response to Putin's War in Ukraine: What Sanctions Are in Force?*, 4 June 2022 diakses dalam <<https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/eu-sanctions-russia/2515388>> (2/4/2023, 20.30 WIB)

<sup>4</sup> De Bundesregierung, *'Response to the Attack: Which Sanctions Have Been Adopted against Russia?'*, *The Federal Government*, 26 July 2022 diakses dalam <<https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/eu-sanctions-2008438>> (2/4/2023, 21.00 WIB)

alam Rusia ke Jerman kemudian berdampak pada keamanan energi dan memicu resesi ekonomi di negara itu. Jerman sedikit banyak telah memperoleh dampak dari penghentian suplai gas alam Rusia terhadap sektor ekonomi dan sosialnya.

Sementara itu, Jerman yang merupakan negara penting di Uni Eropa sebab perannya sebagai pemimpin dalam pembuatan kebijakan luar negeri Eropa, di sisi lain juga memiliki hubungan dengan Rusia yang dibingkai dalam kebijakan *Ostpolitik* dimana *Ostpolitik* sendiri adalah kerangka kerja khusus kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia. Di dalam *Ostpolitik* dijelaskan bahwa hubungan Jerman dan Rusia secara luas dianggap sebagai suatu hal yang penting dan mendasar terhadap keamanan Eropa. Dalam konteks Perang Dingin, contoh utamanya adalah kesediaan Jerman Barat untuk terlibat dengan Uni Soviet melalui kerjasama energi berupa pasokan gas alam, jaringan pipa, dan proyek nuklir.<sup>5</sup> Realisasi dari kerjasama ini dapat dilihat dari pembangunan jaringan pipa gas alam Nord Stream 1 pada tahun 2005 yang kemudian dilanjutkan dengan proyek kedua yaitu Nord Stream 2 pada tahun 2015.<sup>6</sup>

Jerman juga merupakan konsumen terbesar gas alam di Eropa. Perekonomian Jerman sangat bergantung pada kebutuhan gas alam yang mana sebagian besar dibeli dari pemasok luar negeri terutama Rusia. Kerja sama energi yang terjalin antara Jerman dan Rusia telah bertahun-tahun terjalin karena kesamaan kepentingan dan hubungan saling ketergantungan diantara keduanya.

---

<sup>5</sup> Tuomas Forsberg, 'From Ostpolitik to "Frostpolitik"? Merkel, Putin and German Foreign Policy towards Russia', *International Affairs*, 92.1 (2016), 21–42 <<https://doi.org/10.1111/1468-2346.12505>>.

<sup>6</sup> Martin Russel, *The Nord Stream 2 Pipeline: Economic, Environmental, and Geopolitical Issues*, 2021.

Jerman dan Rusia memiliki kepentingan yang sama yakni untuk menjaga keamanan energinya tetapi dengan cara yang berbeda. Jerman memandang keamanan energi sebagai kebutuhan untuk mengimpor pasokan energi yang cukup dan terjangkau sedangkan Rusia memandang keamanan energi sebagai kedaulatan negara atas sumber daya dan kontrol atas ekspor untuk memastikan keamanan permintaan pasokan dari pasar energi serta kebutuhan akan modal untuk memodernisasi dan memperluas sektor energinya.

Perusahaan-perusahaan Jerman juga merupakan investor penuh dalam proyek-proyek energi energi Rusia karena sebagian besar teknologi yang digunakan dalam produksi dan eksplorasi minyak dan gas alam didapatkan dari Jerman. Namun, Jerman meremehkan ketergantungannya pada gas alam dengan tidak adanya opsi diversifikasi sumber pasokan dalam kebijakan energi Jerman. Hal ini semakin diperburuk dengan invasi Rusia ke Ukraina yang memicu krisis gas di Eropa yang tentunya juga memengaruhi Jerman dan negara-negara Uni Eropa yang lain.

Krisis ini kemudian menyadarkan Jerman akan ketergantungannya yang tinggi terhadap gas alam Rusia sehingga untuk mengurangi kerentanannya terhadap krisis serupa di masa depan, Jerman berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada gas Rusia dengan mendiversifikasikan impor gas dari pemasok alternative yang lain dan transisi menuju energi terbarukan. Untuk langkah sementara, Jerman telah memutuskan untuk menanggihkan proses

sertifikasi Nord Stream 2 dimana hal ini menunjukkan bahwa persepsi Jerman terhadap Rusia sebagai mitra dalam kerja sama energi telah berubah.<sup>7</sup>

Persoalan invasi militer yang dilakukan Rusia ke Ukraina beserta dampak dari sanksi negara-negara barat berupa ‘perang ekonomi’ terhadap keamanan energi Jerman menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh dampak ekonomi dan sosial yang diperoleh Jerman terhadap keamanan energinya sekaligus rangkaian sanksi yang diberikan oleh negara-negara Uni Eropa terhadap Rusia. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap dampak sanksi Uni Eropa terhadap keamanan energi Jerman dalam kasus invasi Rusia ke Ukraina sejak Rusia melakukan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

Rusia memiliki peran utama dalam pasar energi global serta menempati urutan ketiga setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat sebagai negara produsen minyak mentah dunia dan berada di posisi kedua di bawah Amerika Serikat sebagai negara penghasil gas alam terbesar di dunia.<sup>8</sup> Di sisi lain, Jerman yang merupakan negara anggota Uni Eropa menjadi negara yang paling bergantung pada pasokan energi dari Rusia.<sup>9</sup> Realita bahwa Jerman memiliki ketergantungan energi pada Rusia serta memiliki hubungan kerja sama yang erat dengan Rusia menarik keinginan penulis

---

<sup>7</sup> Michał Kędzierski, *A Dangerous Dependence on Russia: Germany and the Gas Crisis*, Center For Eastern Studies (Warsaw, 2022) <<https://policycommons.net/artifacts/2296822/osw-commentary-a-dangerous-dependence-on-russia/3057255/>>., hal. 1

<sup>8</sup> International Energy Agency, *Energy Fact Sheet: Why Does Russian Oil and Gas Matter?*, 2022 diakses dalam <<https://www.iea.org/articles/energy-fact-sheet-why-does-russian-oil-and-gas-matter>> (27/3/2023, 21.30 WIB)

<sup>9</sup> Destatis Statistisches Bundesamt, *Facts on Gas Supply: Natural Gas Is Major Energy Source for Industry and Households*, 2022 diakses dalam <[https://www.destatis.de/EN/Press/2022/07/PE22\\_N044\\_43.html](https://www.destatis.de/EN/Press/2022/07/PE22_N044_43.html)> (27/3/2023, 23.00 WIB)

untuk meneliti dampak dari sanksi yang diberikan pihak Barat kepada Rusia di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina terhadap keamanan energi Jerman.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana sanksi dampak sanksi Uni Eropa ke Rusia terhadap keamanan energi Jerman dalam kasus invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih luas dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari sanksi ekonomi yang diberikan oleh negara-negara anggota Uni Eropa kepada Rusia terhadap keamanan energi Jerman dalam kasus invasi Rusia ke Ukraina.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat Akademis**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan baru terhadap semua orang sehingga dapat menjadi inspirasi bagi penelitian lain. Selain itu, diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi studi Ilmu Hubungan Internasional terkait dengan konsep dan teori yang diaplikasikan. Untuk dapat menjawab rumusan masalah penelitian dan memahami fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan satu kerangka teori dan satu kerangka konseptual yaitu *International Sanction Theory* dan konsep *Energy Security Regime*. *International Sanction Theory* disini untuk menjelaskan sanksi ekonomi yang diberikan oleh negara-negara Barat kepada Rusia sedangkan konsep *Energy Security Regime* disini penulis gunakan untuk menjelaskan dampak sanksi

ekonomi yang diberlakukan Uni Eropa kepada Rusia terhadap keamanan energi Jerman terutama dalam aspek sosial dan ekonomi.

### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi keilmuan yang cukup luas dalam bidang studi wilayah Eropa serta studi Ilmu Hubungan Internasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah pemahaman dan wawasan tentang hubungan antara negara-negara anggota Uni Eropa terutama Jerman dan Rusia dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial.

### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak dapat dilakukan tanpa dilepaskan dari penelitian sebelumnya sehingga untuk menegaskan originalitas penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk dikaji. Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai dampak ekonomi dan sosial dari pemberian sanksi Uni Eropa terhadap keamanan energi Jerman dalam kasus invasi Rusia ke Ukraina. Pada setiap kajian yang dibahas akan memunculkan beberapa poin khusus antara lain tema penelitian, teori atau konsep atau paradigma penelitian yang dipakai, ruang lingkup penelitian, data dan metode penelitian dari masing-masing penulis.

**Penelitian yang pertama** adalah penelitian dari **Muhammad Andryan Juliandy** yang berjudul **Masa Depan Gas Alam dan Ekonomi Jerman dalam Konstelasi Perang Rusia-Ukraina**. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina memberikan pengaruh terhadap ketergantungan Jerman

atas suplai gas alam dari Rusia yang kemudian berdampak pada perekonomian Jerman. Kerangka teori yang digunakan untuk alat analisis adalah teori Interdependensi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara studi literature untuk mendapatkan data dan informasi. Hasil dalam penelitian ini didapatkan bahwa Jerman memiliki ketergantungan atas gas alam Rusia yang mana ketergantungan ini memengaruhi kestabilan ekonomi Jerman dan hubungan politik Jerman terhadap Uni Eropa.<sup>10</sup> Penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian penulis karena dalam penelitian yang akan diteliti penulis menggunakan teori *International Sanctions* dan konsep *Energy Security Regimes*.

**Penelitian kedua** adalah jurnal dari **Safa Muzdalifah** yang berjudul **Perspektif Interdependensi Kompleks: Kontinuitas Kerjasama Energi Uni Eropa-Rusia Di Tengah Polemik Politik Energi Rusia Atas Ukraina**. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas kerjasama energi Rusia dengan Uni Eropa, namun yang membedakan adalah penelitian penulis lebih memfokuskan pada dampaknya terhadap keamanan energi Jerman. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu dalam penggunaan konsep *Energy Security*. Namun, yang membedakan adalah penggunaan kerangka teorinya, di dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori yang mengarah pada International Sanction Theory menurut Susanne Oxenstierna dan Per Olsson.

---

<sup>10</sup> Muhammad Andryan Juliardy, 'Masa Depan Gas Alam Dan Ekonomi Jerman Dalam Konstelasi Perang Rusia-Ukraina', *Jurnal Sentris*, 4.1 (2023), 34-45 <<https://doi.org/10.26593/sentris.v4i1.6339.34-45>>.



Di tengah perdebatan kebijakan politik energi Rusia terhadap Ukraina, penelitian ini merujuk pada penjelasan tentang kelanjutan kerja sama energi antara Uni Eropa-Rusia. Keharmonisan hubungan antara Uni Eropa-Rusia dipengaruhi oleh politik energi Rusia terhadap Ukraina. Hal ini berkaitan dengan efek domino politik energi dari penghentian pasokan gas Rusia ke Uni Eropa. Tepat ketika Rusia menghentikan pasokan gasnya melalui Ukraina, maka berkurang juga pasokan energi ke beberapa negara anggota Uni Eropa sehingga mengancam keberlangsungan sektor vital dalam negara seperti konsumsi industri, rumah tangga, dan sarana umum.

Teori interdependensi kompleks yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori Robert O. Keohane dan Joseph Nye. Selain itu, penelitian juga menggunakan kerangka konseptual keamanan energi yang mana *Energy Security* merupakan konsep yang dipandang sebagai rekonsiliasi atau jalan tengah yang dipilih atas pertimbangan jaminan keamanan energi. Produksi, distribusi, dan kemudian konsumsi energi adalah bagian dari jaminan keamanan energi.<sup>11</sup>

**Penelitian ketiga** adalah skripsi dari **Syella Fargina Hanifah** yang berjudul **Dampak Embargo Uni Eropa Kepada Rusia Terhadap Hubungan Bilateral Jerman-Rusia**. Penelitian ini berfokus pada dampak dari embargo Uni Eropa kepada Rusia terhadap hubungan bilateral antara Jerman dan Rusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Neorealisme dan konsep Ekonomi Politik Internasional, Politik Internasional, dan Kerja Sama Bilateral. Metode penelitian

---

<sup>11</sup> Safa Muzdalifah, 'PERSPEKTIF INTERDEPENDENSI KOMPLEKS: KONTINUITAS KERJASAMA ENERGI UNI EROPA-RUSIA DI TENGAH POLEMIK POLITIK ENERGI RUSIA ATAS UKRAINA', *Jurnal @Trisula LP2M Undar Edisi*, 4 (2016).

yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik studi kepustakaan yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa embargo yang diberlakukan oleh Uni Eropa memberikan dampak yang signifikan pada hubungan bilateral antara Jerman dan Rusia yang kemudian memicu Rusia untuk menghentikan operasionalisasi jaringan pipa Nord Stream 2 sehingga membuat Jerman harus mencari mengimpor gas alam dari negara lain guna memenuhi kebutuhan energinya.<sup>12</sup> Penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dalam penelitian penulis, digunakan teori *International Sanctions* dan konsep *Energy Security Regimes* sebagai alat analisis.

**Penelitian yang keempat** adalah skripsi yang ditulis oleh **Prabu Haryo Pamungkas** dengan judul **Pengaruh Konflik Rusia Terhadap Keamanan Energi Jerman**. Penelitian ini menjelaskan bahwa konflik Rusia-Ukraina telah memberikan pengaruh terhadap keamanan energi Jerman. Embargo yang diberlakukan kepada Rusia menimbulkan terhentinya pasokan energi ke Jerman yang kemudian menyebabkan terjadinya krisis energi. Penelitian ini menggunakan indikator yang disediakan oleh Berry Kruyt dkk sebagai alat analisis untuk melihat tingkat stabilitas dan perubahan negative atau positif pada keamanan energi Jerman setelah perang antara Rusia dan Ukraina. Konflik antara Rusia dan Ukraina memberikan perubahan positif pada keamanan energi Jerman yang dibuktikan dengan adanya kerja sama baru dengan negara lain serta disusunnya kebijakan baru

---

<sup>12</sup> Syella Fargina Hanifah, 'DAMPAK EMBARGO UNI EROPA KEPADA RUSIA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL JERMAN-RUSIA' (Univesitas Pasundan Bandung, 2023).

yang membuat Jerman mampu mengamankan pasokan energinya.<sup>13</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dimana penulis menggunakan teori *International Sanctions* dan konsep *Energy Security Regimes* sebagai alat analisis.

**Penelitian kelima** adalah skripsi dari **Andi Faradilla Ayu Lestari** yang berjudul **Dampak Invasi Rusia ke Ukraina Terhadap Krisis dan Transisi Energi Jerman**. Penelitian ini mengkaji dampak invasi Rusia ke Ukraina terhadap krisis energi di Jerman serta bagaimana pemerintahan Jerman menanggapi krisis energi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data library research yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber sekunde seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan berita online. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perang agresi Rusia di Ukraina memicu rentetan tanggapan di sektor energi yang kemudian berdampak pada timbulnya krisis energi di Jerman.<sup>14</sup>

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kekurangan yang mana secara khusus belum mengkaji bagaimana sanksi Uni Eropa dapat membebani perekonomian Rusia serta bagaimana dampak sanksi tersebut terhadap perubahan rezim keamanan energi antara Jerman dan Rusia yang kemudian memengaruhi keamanan energi Jerman dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina. Kurangnya penelitian yang berfokus pada sanksi Uni Eropa ke Rusia dan dampaknya terhadap keamanan energi Jerman setelah sanksi diberlakukan menyebabkan kesenjangan

---

<sup>13</sup> Prabu Haryo Pamungkas, 'Pengaruh Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Keamanan Energi Jerman' (Universitas Andalas, 2023) <<http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/209779>>.

<sup>14</sup> Andi Lestari Faradilla, '*Dampak Invasi Rusia Ke Ukraina Terhadap Krisis Dan Transisi Energi Jerman*' (Univesitas Hasanuddin Makassar, 2023).

dalam pemahaman bagaimana sanksi tersebut memengaruhi keamanan energi Jerman, termasuk kestabilan pasokan energi dan diversifikasi energi.

**Tabel 1. 1 Posisi Penelitian**

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1.	<b>Muhammad Andryan Juliandy</b> yang berjudul <b>Masa Depan Gas Alam dan Ekonomi Jerman dalam Konstelasi Perang Rusia-Ukraina</b>	<b>Jenis Penelitian:</b> Kualitatif <b>Pendekatan:</b> Teori Interdependensi	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina memberikan pengaruh terhadap ketergantungan Jerman atas suplai gas alam dari Rusia yang kemudian berdampak pada perekonomian Jerman. Hasil dalam penelitian ini didapatkan bahwa Jerman memiliki ketergantungan atas gas alam Rusia yang mana ketergantungan ini memengaruhi kestabilan ekonomi Jerman dan hubungan politik Jerman terhadap Uni Eropa.
2.	<b>Safa Muzdalifah</b> yang berjudul <b>“Perspektif Interdependensi Kompleks: Kontinuitas Kerjasama Energi Uni Eropa-Rusia Di Tengah Polemik Politik Energi Rusia Atas Ukraina”</b>	<b>Jenis Penelitian:</b> Kualitatif <b>Pendekatan:</b> Teori Interdependensi Kompleks dan konsep Energy Security	Di tengah perdebatan kebijakan politik energi Rusia terhadap Ukraina, penelitian ini merujuk pada penjelasan tentang kelanjutan kerja sama energi antara Uni Eropa-Rusia. Keharmonisan hubungan antara Uni Eropa-Rusia dipengaruhi oleh politik energi Rusia terhadap Ukraina. Hal ini berkaitan dengan efek domino politik energi dari penghentian pasokan gas Rusia ke Uni Eropa. Tepat ketika Rusia menghentikan pasokan gasnya melalui Ukraina, maka berkurang

			juga pasokan energi ke beberapa negara anggota Uni Eropa sehingga mengancam keberlangsungan sektor vital dalam negara seperti konsumsi industri, rumah tangga, dan sarana umum.
3.	<b>Syella Fargina Hanifah</b> yang berjudul <b>Dampak Embargo Uni Eropa Kepada Rusia Terhadap Hubungan Bilateral Jerman-Rusia</b>	<b>Jenis Penelitian:</b> Kualitatif deskriptif <b>Pendekatan:</b> Neorealisme	Penelitian ini berfokus pada dampak dari embargo Uni Eropa kepada Rusia terhadap hubungan bilateral antara Jerman dan Rusia. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa embargo yang diberlakukan oleh Uni Eropa memberikan dampak yang signifikan pada hubungan bilateral antara Jerman dan Rusia yang kemudian memicu Rusia untuk menghentikan operasionalisasi jaringan pipa Nord Stream 2 sehingga membuat Jerman harus mencari mengimpor gas alam dari negara lain guna memenuhi kebutuhan energinya.
4.	<b>Prabu Haryo Pamungkas</b> dengan judul <b>Pengaruh Konflik Rusia Terhadap Keamanan Energi Jerman</b>	<b>Jenis Penelitian:</b> Kualitatif <b>Pendekatan:</b> Konsep Energy Security	Penelitian ini menjelaskan bahwa konflik Rusia-Ukraina telah memberikan pengaruh terhadap keamanan energi Jerman. Embargo yang diberlakukan kepada Rusia menimbulkan terhentinya pasokan energi ke Jerman yang kemudian menyebabkan terjadinya krisis energi. Konflik antara Rusia dan Ukraina memberikan perubahan positif pada keamanan

			energi Jerman yang dibuktikan dengan adanya kerja sama baru dengan negara lain serta disusunnya kebijakan baru yang membuat Jerman mampu mengamankan pasokan energinya.
5.	<b>Andi Faradilla Ayu Lestari</b> yang berjudul <b>Dampak Invasi Rusia ke Ukraina Terhadap Krisis dan Transisi Energi Jerman</b>	<b>Jenis Penelitian:</b> Kualitatif <b>Pendekatan:</b> Konsep Energy Security	Penelitian ini melihat bagaimana invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan krisis energi di Jerman dan bagaimana pemerintah Jerman menanganinya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa rentetan reaksi di sektor energi dipicu oleh invasi tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan krisis di Jerman.

## 1.5 Kerangka Teoritik dan Konseptual

### 1.5.1 Teori *International Sanctions*

Setelah berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, penggunaan sanksi sebagai instrumen negara semakin meningkat secara signifikan. Para pendukung sanksi melihat hal ini sebagai sebuah alternatif yang lebih ringan dan lebih murah untuk mengintervensi militer. Penggunaan kerangka teori ini di dalam penelitian “Dampak Sanksi Uni Eropa ke Rusia terhadap Keamanan Energi Jerman” bertujuan untuk menunjukkan bahwa sebelum sebuah sanksi ekonomi diberlakukan terdapat penyaringan sanksi melalui sejumlah faktor atau keadaan yang menentukan dampak dari sanksi tersebut. Kemudian peneliti mengidentifikasi faktor-faktor secara empiris literature sanksi yang telah ditemukan untuk mengetahui apakah sanksi tersebut akan memberikan dampak yang melemahkan atau memperkuat.

Menurut Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, dan Barbara Oegg, sanksi merupakan sarana untuk membebani negara sasaran, dengan tujuan untuk mengubah perilaku politik atau kebijakan dari negara sasaran yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara pengirim tanpa harus menggunakan kekuatan politik. Dalam sebagian besar kasus, negara-negara yang menerapkan sanksi adalah negara-negara yang menjalankan kebijakan luar negeri secara aktif.<sup>15</sup> Sanksi ekonomi digunakan oleh negara pemberi sebagai cara untuk mempengaruhi perilaku atau kebijakan pemerintah negara target tanpa menggunakan kekuatan militer.<sup>16</sup>

Istilah “pengirim” digunakan untuk merujuk pada negara atau organisasi internasional yang menerapkan sanksi dimana lebih dari satu negara dapat terlibat dalam pemberian sanksi. Dalam beberapa kasus, satu atau lebih dari dua negara dan organisasi internasional, dapat berbagi kepemimpinan yang mana dalam kasus ini keduanya tercantum sebagai negara pengirim. Selanjutnya, istilah “target” digunakan untuk merujuk pada negara yang menjadi objek langsung dari sanksi tersebut.<sup>17</sup> Dampak yang disebabkan oleh pemberian sanksi, biasanya tidak dapat terlihat secara langsung pada perilaku politik.

Penggunaan sanksi ekonomi dalam pelaksanaan politik luar negeri memiliki beberapa poin penting yakni tujuan dari negara pengirim sanksi, tanggapan balasan dari negara target, dan ketergantungan perdagangan antara negara pengirim dan

---

<sup>15</sup> Gary Clyde Hufbauer and others, *Economic Sanctions Reconsidered*, 3rd edn (Washington DC: Peterson Institute for International Economics, 2007), hal. 5

<sup>16</sup> William H. Kaempfer and Anton D. Lowenberg, ‘The Political Economy of Economic Sanctions’, in *Handbook of Defense Economics*, 2007, II, 867–911 <[https://doi.org/10.1016/S1574-0013\(06\)02027-8](https://doi.org/10.1016/S1574-0013(06)02027-8)>, hal. 869

<sup>17</sup> Hufbauer and others., *Op.Cit.*, hal. 43-44

negara target. Dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi menyampaikan tiga pesan yakni bagi negara pengirim, sanksi ini menunjukkan bahwa negara pengirim tidak membenarkan tindakan negara target sedangkan bagi negara target, sanksi berarti bahwa kata-kata akan didukung dengan perbuatan, dan bagi masyarakat di negara pengirim hal ini menunjukkan bahwa pemerintah akan betindang untuk melindungi kepentingan vital negara.<sup>18</sup>

Sanksi sering kali tidak berhasil untuk mengubah perilaku negara target. Hal yang mejadi alasan dari kegagalan adalah sanksi yang dijatuhkan mungkin tidak memadai karena tujuan yang terlalu sulit dipahami atau cara yang digunakan terlalu lunak; sanksi dapat menciptakan penawarnya sendiri, secara khusus sanksi ekonomi dapat membuat negara target mencari alternative komersial yang lain; dan sanksi dapat mendorong sekutu yang kuat dari negara target untuk mengambil peran sebagai pasar alternative untuk ekspor, karena bagi mereka sanksi telah memberikan peluang bisnis yang menguntungkan dimana dukungan mereka sebagian besar dapat mengimbangi kerugian yang diakibatkan oleh sanksi itu sendiri.

Negara pengirim akan menggunakan tiga cara utama untuk membebani negara target yakni dengan pembatasan ekspor dan impor, atau dengan pembatasan keuangan, termasuk pembekuan aset negara target yang berada dalam kendali pengirim serta pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi individu yang bertanggung jawab atas perilaku yang tidak diinginkan oleh negara pengirim.

---

<sup>18</sup> Gary Clyde Hufbauer and others, *Economic Sanctions Reconsidered*, 3rd edn (Washington DC: Peterson Institute for International Economics, 2007)., hal. 2



Sanksi perdagangan menimbulkan kerugian bagi negara target karena berdampak pada hilangnya pasar ekspor, penolakan impor terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan, harus menerima harga yang lebih rendah untuk ekspor yang diembargo, dan harus membayar harga yang lebih tinggi untuk impor pengganti. Dalam penelitian ini, Jerman diidentifikasi sebagai negara pemberi sanksi sedangkan Rusia diidentifikasi sebagai negara target. Berdasarkan tujuan sanksi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri yang telah diklasifikasikan oleh Garry Clyde Hufbauer dkk dalam bukunya yang berjudul “*Economic Sanctions Reconsidered*”, sanksi ekonomi yang diberlakukan Jerman ke Rusia bertujuan untuk mengubah kebijakan Rusia dimana Jerman ingin membuat Rusia mengentikan invasinya dan menarik diri dari Ukraina.

Penelitian ini menggunakan indikator ekonomi yang meliputi, *trade dependency* dan *sanctions cost for the sender*. Hasil dari sanksi dapat dipengaruhi oleh ketergantungan perdagangan di antara negara pengirim dan negara target. Indikator ini menjelaskan bahwa biaya sanksi yang dikenakan kepada negara target memiliki keterkaitan dengan tingkat ketergantungan perdagangan antara negara pengirim dan negara target sebelum diberlakukannya sanksi. Sanksi perdagangan menimbulkan kerugian bagi negara target dalam hal hilangnya pasar ekspor, penolakan impor, menerima harga yang lebih rendah untuk ekspor yang diembargo, dan membayar harga yang lebih tinggi untuk impor pengganti.<sup>19</sup>

Sanksi juga dapat menimbulkan biaya bagi negara pengirim. Jika perekonomian negara pengirim sangat dirugikan oleh sanksi, biaya sanksi dapat

---

<sup>19</sup> Hufbauer and others., *Op.Cit.*, hal. 90

mencegah pengirim untuk mempertahankan atau meningkatkan sanksi sehingga mampu mengurangi peluang keberhasilan sanksi. Ketika perdagangan energi terganggu perusahaan dan rumah tangga domestik negara pengirim akan memperoleh dampaknya langsung. Semua mitra dagang dari negara pengirim akan terdorong untuk melakukan diversifikasi sumber pasokan dan mencari mitra alternative untuk menggantikan posisi negara sasaran. Hilangnya kontak dagang dapat menimbulkan beban ekonomi dalam bentuk hilangnya penjualan dan pekerjaan bagi negara pengirim.<sup>20</sup>

Teori *International Sanctions* disini penulis gunakan untuk menjelaskan dampak sanksi ekonomi Jerman terhadap perekonomian Rusia serta mengidentifikasi kuat atau lemahnya dampak dari sanksi yang diberlakukan tersebut pada ekonomi Rusia berdasarkan indikator yang telah dijelaskan sebelumnya. Negara-negara anggota Jerman memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia dengan tujuan untuk mengubah perilaku atau kebijakan Rusia agar segera menghentikan intervensinya ke wilayah Ukraina.

### **1.5.2 Energy Security Regimes**

Dalam bukunya “*Power and Interdependence*”, Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye mendefinisikan rezim internasional sebagai institusi untuk jenis kegiatan tertentu, yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi hubungan saling ketergantungan dengan menciptakan atau menerima aturan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antar negara.<sup>21</sup> Rezim internasional diciptakan untuk

---

<sup>20</sup> Hufbauer and others., *Op.Cit.*, hal. 108

<sup>21</sup> Robert O. Keohane and Joseph Nye S. Jr, *Power and Interdependence*, ed. by Vikram Mukhija Editorial, 4th edn (New York: Longman, 2001)., hal. 5

menangani masalah-masalah yang dianggap terkait erat sehingga harus ditangani bersama oleh birokrasi yang sama atau yang terkoordinasi dengan baik, dibandingkan dengan isu-isu yang ditangani secara terpisah dan tidak terkoordinasi.<sup>22</sup>

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh teori rezim internasional di atas, rezim keamanan energi dapat didefinisikan sebagai pengaturan di bidang keamanan energi yang mana dicirikan oleh tingkat saling ketergantungan yang tinggi antara pasar energi, eksportir, importir energi, dll.<sup>23</sup> Pilar-pilar rezim ketahanan energi adalah berbagai transaksi antar aktor yang melibatkan perdagangan energi sehingga dapat dinyatakan bahwa di sektor energi terjalin hubungan saling ketergantungan yang sangat kuat karena adanya saling ketergantungan antara eksportir energi dan importir energi. Selain itu, karena keterkaitan pasar energi dan harga energi, eksportir energi juga saling bergantung satu sama lain. Hal yang sama berlaku untuk importir energi, yang sering kali dipaksa untuk bekerja sama untuk memastikan keamanan energi mereka secara kolektif. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara pengekspor dan pengimpor energi biasanya memiliki kepentingan yang saling bertentangan dimana kelompok pertama tertarik pada keamanan permintaan energi, sementara kelompok kedua mencari keamanan pasokan energi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, *After Hegemony* (New Jersey: Princeton University Press, 1984) <<https://doi.org/10.1515/9781400820269>>., hal. 61

<sup>23</sup> Esakova., *Op.Cit.*, hal. 78

<sup>24</sup> Esakova., *Op.Cit.*, hal. 79

Mason Willrich berpendapat bahwa bagi negara-negara pengimpor gas alam, pengamanan pasokan energi menjadi perhatian yang utama dalam ketahanan energi. Secara khusus, keamanan energi dari negara pengimpor gas alam terdiri dari tiga tingkatan. *Pertama*, dalam pengertian sempit, ketahanan energi berarti jaminan tercukupinya pasokan energi untuk mempertahankan produksi nasional selama perang. *Kedua*, dalam pengertian luas, ketahanan energi adalah menjamin terpenuhinya pasokan energi untuk memastikan bahwa perekonomian nasional berjalan secara normal. *Ketiga*, ketahanan energi juga berarti bahwa pasokan energi cukup untuk menjaga ekonomi negara bertahan dalam bentuk yang dapat diterima secara politik.<sup>25</sup>

Untuk negara pengekspor gas alam, keamanan energi berarti: 1) kedaulatan negara atas sumber daya alam terjaga, tanpa adanya invasi militer dari pihak asing untuk memaksakan kontrol mereka dan intervensi eksternal untuk mengganggu pengembangan sumber daya; 2) mengamankan kebutuhan, yaitu akses ke pasar luar negeri; dan 3) memastikan keamanan finansial dari pendapatan ekspor energi. Kedaulatan memberikan kekuasaan eksklusif kepada negara atas wilayah karena sebuah pemerintahan yang independen dapat memiliki wilayah dan mengendalikannya. Kendali dan kepemilikan teritorial sumber daya merupakan bentuk dari kemerdekaan sebuah negara. Dalam hal ini, kedaulatan melindungi kebebasan negara untuk memilih jalannya sendiri, dalam hal eksplorasi, eksploitasi,

---

<sup>25</sup> Mason Willrich, *Energy and World Politics* dalam Yu Jianhua and Dai Yichen, 'Energy Politics and Security Concepts from Multidimensional Perspectives', *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, 6.4 (2012), 91–120 <<https://doi.org/10.1080/19370679.2012.12023215>>.

dan konservasi sumber daya alamnya.<sup>26</sup> Negara penghasil energi memiliki kontrol penuh atas tiga elemen utama dari rantai energi yakni produksi, transit, pemrosesan, dan distribusi. Oleh karena itu, beberapa negara penghasil energi masih melihat sumber daya dan infrastruktur energi mereka sebagai salah satu pilar utama negara dan sarana untuk memposisikan diri secara signifikan dalam pasar energi global.<sup>27</sup> Dengan demikian Mason Willrich mengemukakan bahwa energi mengacu pada hubungan interaktif antara negara pengimpor dan negara pengekspor. Negara pengimpor ingin menjamin kecukupan pasokan energi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara, sedangkan negara pengekspor mencari pasar dan keamanan investasi.<sup>28</sup>

Daniel Yergin menjelaskan bahwa *Energy Security Regimes* atau Rezim Keamanan Energi menjamin keamanan pasar energi global akan membutuhkan koordinasi baik di tingkat internasional maupun nasional di antara perusahaan dan pemerintah, termasuk badan-badan energi, lingkungan, militer, penegak hukum, dan intelijen. Di mana kerja sama terjadi, rezim pasti akan terbentuk. Daniel Yergin mencatat bahwa ketahanan energi bukanlah isu nasional sendiri sehingga membutuhkan dialog yang erat baik di antara dan antara produsen dan konsumen, mengingat bahwa ekspektasi permintaan yang dapat diprediksi sama pentingnya bagi produsen seperti halnya keamanan pasokan bagi konsumen. Oleh karena itu, selain rezim produsen dan konsumen energi, juga terdapat rezim yang terdiri dari

---

<sup>26</sup> Virginie Barral, 'National Sovereignty Over Natural Resources: Environmental Challenges and Sustainable Development', *Research Handbook on International Law and Natural Resources*, December, 2016 <<https://doi.org/10.4337/9781783478330.00011>>., hal. 3

<sup>27</sup> Danila Bochkarev and Greg Austin, 'Energy Sovereignty and Security', *EastWest Institute*, 1 (2007) <<https://doi.org/10.62343/cjss.2009.29>>., hal. 2-3

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal.108

kerja sama antara negara produsen dan energi dan negara konsumen energi. Kerja sama ini berbentuk dialog atau negosiasi strategis antara para aktor, yang mungkin sulit dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat.<sup>29</sup>

Sebuah studi yang dilakukan oleh *Oxford Institute for Energy Studies*, yang membahas tentang konsep dialog antara produsen dan konsumen energi, mendefinisikan dialog energi formal sebagai negosiasi multilateral antara negara-negara berdaulat, yang hanya mungkin dilakukan ketika pihak-pihak di kedua sisi eksportir atau importir masing-masing menghadapi masalah serius yang ingin mereka selesaikan.<sup>30</sup> Rezim keamanan energi dapat berbentuk kerja sama multilateral, yang melibatkan berbagai negara konsumen energi, produsen energi, dan negara transit atau terfokus pada hubungan bilateral antara dua negara. Negara-negara produsen energi, konsumen energi, dan transit serta perusahaan-perusahaan penghasil minyak dan gas multinasional dan nasional atau kelompok usaha dapat menjadi aktor dalam rezim keamanan energi.

Dalam penulisan ini, rezim keamanan energi digunakan untuk menjelaskan adanya rezim keamanan energi yang mengatur perdagangan energi antara Jerman sebagai negara konsumen energi dan Rusia sebagai negara produsen energi serta dampak dari penghentian suplai gas alam Rusia ke Jerman terhadap keamanan

---

<sup>29</sup> Daniel Yergin, 2005, *Energy Security and Markets*, hal. 51-64, dalam Jan H. Kalicki; David L. Goldwyn, 2005, *Energy & Security: Towards a New Foreign Policy Strategy*, Woodrow Wilson Center Press, Washington D.C., The John Hopkins University Press, Baltimore, hal. 52, dalam Esakova., hal. 79

<sup>30</sup> Robert Mabro, *A Dialogue Between Oil Producers and Consumers: The Why and the How*, Oxford Institute for Energy Studies (Oxford, 1991) <<https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/SP2-ADialogueBetweenOilProducersandConsumersTheWhyandtheHow-rMabro-1991.pdf>>., hal. 2

energi Jerman. Rezim keamanan energi dapat berbentuk kerja sama multilateral yang melibatkan berbagai negara konsumen dan produsen energi serta negara transit. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan multinasional swasta penghasil minyak dan gas dianggap sebagai aktor penting dalam rezim keamanan energi internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa penghentian ini merupakan respon dari Rusia atas sanksi ekonomi yang diberlakukan Jerman sebagai bagian dari koordinasi gabungan negara-negara anggota Uni Eropa dalam menanggapi keputusan Rusia untuk menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022.

Dalam hal ini, Rusia diidentifikasi sebagai negara produsen energi atau pengeksport, yang mengartikan bahwa ia memiliki kontrol kebijakan dan kedaulatan atas sumber daya alamnya serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga sumber daya dan kemampuan produksinya. Sementara itu, penulis mengidentifikasi Jerman sebagai negara konsumen energi atau pengimpor yang dalam pemenuhan energi harus memasok dari negara sumber energi. Isu yang menjadi perhatian utama dalam keamanan energi adalah akses dan sarana distribusi energi yangimbang. Penelitian ini akan berfokus pada rezim dialog dicirikan oleh perbedaan kepentingan para pihak dan dijalankan oleh konsensus atau kesepakatan bersama. Para aktor yang terlibat dalam dialog energi tertarik pada hasil yang saling menguntungkan sehingga akan menyusun dan mengadopsi prinsip-prinsip serta mekanisme tertentu guna mencapai kesepakatan dalam negosiasi serta menjelaskan bagaimana rezim dialog antara Uni Eropa dan Rusia dapat berdampak bagi keamanan energi Jerman sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Esakova., *Op.Cit.*, hal. 84

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan secara rinci suatu kasus atau fenomena yang sudah terjadi maupun sedang terjadi dengan mengumpulkan fakta, memilih fakta, dan mengeneralisasi fakta secara sistematis. Penelitian studi kasus deskriptif biasanya digunakan untuk mengeksplorasi subjek yang belum banyak diketahui sebelumnya atau fenomena yang membutuhkan interpretasi yang memberikan penjelasan baru pada data yang diketahui.<sup>32</sup> Penulis dalam penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan juga menjelaskan dampak sanksi Uni Eropa terhadap keamanan energi Jerman dalam kasus invasi Rusia ke Ukraina.

### **1.6.2 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan dampak sanksi yang diterapkan oleh negara-negara Uni Eropa ke Rusia terhadap keamanan energi Jerman. Dengan kata lain, penelitian ini akan menggunakan data kualitatif yang menunjukkan kualitas dari suatu fenomena yang kemudian diuraikan ke dalam bentuk perkataan sehingga penulis disini mengumpulkan informasi-informasi (data kualitatif) yang mendukung penelitian ini untuk dijadikan data pendukung teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menggunakan strategi narasi kajian teoritis, dan studi

---

<sup>32</sup> Donatella Della Porta and Michael Keating, *Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective*, ed. by Donatella Della Porta and Michael Keating, 1st edn (New York: Cambridge University Press, 2008).



kasus. Teknik analisis data yang ditekankan dalam penelitian ini adalah metode induksi, yaitu mengumpulkan, memilah, mengelompokkan, menganalisis secara lengkap, rigid, dan kronologis data mengenai fenomena yang diteliti kemudian digunakan untuk membentuk generalisasi sebagai hasil akhir daripada riset yang dilakukan.<sup>33</sup>

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik library research atau studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder. Sumber sekunder yang dimaksudkan berasal dari berbagai macam sumber bacaan seperti buku, laporan, jurnal, e-book, skripsi, artikel, dan berita online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.<sup>34</sup>

### **1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.6.4.1 Batasan Materi**

Agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dalam pembahasannya, peneliti membatasi dengan menjelaskan dampak dari sanksi ekonomi yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap keamanan energi Jerman baik di sektor ekonomi maupun sosial.

#### **1.6.4.2 Batasan Waktu**

Konflik antara Rusia dan Ukraina bermula pada tahun 2013 terkait intervensi Presiden Vladimir Putin terhadap keputusan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych menolak kerjasama ekonomi yang ditawarkan Uni Eropa. Kemudian, konflik antara

---

<sup>33</sup> Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi.*, 1990., hal. 93.

<sup>34</sup> Purwono, 'Studi Kepustakaan' <[https://e-journal.usd.ac.id/index.php/Info\\_Persadha/article/download/25/21](https://e-journal.usd.ac.id/index.php/Info_Persadha/article/download/25/21)> [accessed 5 April 2023]., hal. 67-69.

Rusia dan Ukraina semakin memanas setelah Rusia menganeksasi Krimea pada tahun 2014. Selanjutnya, pada tahun 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua kota yang memisahkan diri dari pemerintahan Ukraina di wilayah Donbass, Ukraina Timur, yang kemudian disusul dengan pernyataan Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan angkatan bersenjataanya memasuki negara Ukraina. Setelah, pernyataan tersebut dirilis, Uni Eropa yang merupakan organisasi internasional yang mayoritas beranggotakan negara-negara di wilayah Eropa Barat, satu persatu mulai menjatuhkan hukuman sanksi kepada Rusia. Dengan demikian, batasan waktu dalam penelitian ini adalah dimulai dari tahun 2013 hingga tahun 2023.

### **1.7 Argumen Pokok**

Berdasarkan pada hasil analisa sementara dengan menggunakan *International Sanction Theory* dan *Energy Security Regimes* didapatkan bahwa sanksi ekonomi merupakan sarana yang digunakan oleh negara-negara Uni Eropa termasuk Jerman untuk membebani Rusia dengan tujuan menggoyahkan perekonomian Rusia sehingga Presiden Vladimir Putin dapat merubah perilakunya atau keputusannya untuk mengakhiri invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina serta bagaimana rezim keamanan energi antara Uni Eropa dan Rusia dapat terganggu atau berubah sebagai akibat dari penerapan sanksi internasional.

Sementara itu, Jerman yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Uni Eropa, memiliki hubungan dengan Rusia yang dibingkai dalam kebijakan Ostpolitik dimana Ostpolitik sendiri adalah kerangka kerja khusus kebijakan luar negeri Jerman terhadap Rusia. Jerman juga merupakan mitra strategis Rusia di

sektor perdagangan energi dimana perusahaan-perusahaan Jerman menjadi investor penuh dalam proyek-proyek energi energi Rusia dan sebagian besar teknologi yang digunakan Rusia dalam produksi dan eksplorasi minyak dan gas alam didapatkan dari Jerman. Realisasi dari kerja sama ini dapat dilihat dari pembangunan jaringan pipa gas alam Nord Stream 1 pada tahun 2005 yang kemudian dilanjutkan dengan proyek kedua yaitu Nord Stream 2 pada tahun 2015.

Dalam hal ini, Rusia diidentifikasi sebagai negara produsen energi atau pengeksport, yang mengartikan bahwa ia memiliki kontrol kebijakan dan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga sumber daya dan kemampuan produksinya. Sementara itu, penulis mengidentifikasi Jerman sebagai negara pengimpor yang dalam pemenuhan energi harus memasok dari negara sumber energi. Isu yang menjadi perhatian utama dalam keamanan energi adalah akses dan sarana distribusi energi yangimbang.

Sanksi ekonomi yang diberikan Jerman kepada Rusia memicu krisis energi di Jerman yang diakibatkan dari penghentian suplai gas alam Rusia ke Jerman dan mendorong negara ini untuk memperkuat rezim keamanannya. Namun, meskipun sanksi berhasil mengganggu hubungan energi antara Jerman dan Rusia, ketergantungan Jerman pada pasokan energi Rusia telah menghambat upaya diversifikasi dan menguji ketahanan sistem keamanan energi Jerman. Akibatnya, meskipun sanksi berhasil memberikan tekanan signifikan pada Rusia, sanksi juga telah menunjukkan adanya kerentanan dalam rezim keamanan energi Jerman yang harus segera dimitigasi untuk memastikan stabilitas energi jangka panjang. Krisis energi yang dialami Jerman kemudian berdampak pada aspek sosial dan ekonomi

dalam negeri. Dalam aspek sosial, krisis energi berdampak pada perubahan pola konsumsi energi rumah tangga sedangkan dalam aspek ekonomi krisis energi memengaruhi biaya operasional perusahaan industri dan manufaktur Jerman. Pada kuartal kedua tahun 2022 sekitar bulan April hingga Juni, Jerman mengalami kerugian sebesar 12,7%. Selanjutnya, di bidang sosial, berdampak pada para pekerja di Jerman dimana kurang lebih 5,6 juta lapangan pekerjaan bergantung pada energi gas alam. Selain itu, gas alam menjadi sumber energi pemanas utama bagi 40,9 juta rumah tangga di Jerman khususnya ketika memasuki musim dingin.



## 1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memahami skripsi ini dengan lebih mudah, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan**

<b>BAB</b>	<b>JUDUL</b>
Bab I Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.5.1 <i>International Sanction Theory</i> 1.5.2 <i>Konsep Energy Security Regime</i> 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisis 1.6.2 Tipe Penelitian 1.6.3 Teknik Analisa Data 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.5.1 Batasan Waktu 1.6.5.2 Batasan Materi 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan
Bab II Rezim Keamanan Energi Jerman-Rusia	2.1 Fondasi Hubungan Energi Jerman-Rusia 2.2 Rezim Keamanan Energi antara Jerman-Rusia 2.3 Dependensi Jerman terhadap Energi Rusia

<p>Bab III Dampak Sanksi Ekonomi Uni Eropa Terhadap Keamanan Energi Jerman</p>	<p>3.1 Dinamika Sanksi Uni Eropa ke Rusia 3.2 Dampak Pembatasan Suplai Energi Rusia terhadap Keamanan Energi Jerman 3.2.1 Konsumsi Energi Jerman Sebelum Invasi Rusia ke Ukraina 3.2.2 Situasi Energi Jerman Setelah Februari 2022 3.2.3 Dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap Keamanan Energi Jerman 3.3 Dampak Sanksi Uni Eropa ke Rezim Keamanan Energi Jerman-Rusia</p>
<p>Bab IV</p>	<p>4.1 Kesimpulan 4.2 Saran</p>



